

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*“Throughout the world, women are neglected in terms of resources, representation and rights. This is the simple reason why we are pursuing a feminist foreign policy – with full force, around the world.” (The Sweden Government’s Statement of Foreign Policy 2018).* Adanya kepercayaan dari pemerintah Swedia bahwa adanya situasi *gender equality* dalam suatu negara cenderung mengarah pada kesuksesan demokratisasi, dimana adanya partisipasi perempuan dalam pemerintahan dapat mengarah pada keadaan masyarakat yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, kesehatan yang lebih baik dan keamanan yang lebih tinggi menjadi alasan mengapa negara Swedia sangat gencar dalam mempromosikan *gender equality* baik itu di domestik maupun internasional. (Ministry for Foreign Affairs, 2019). Hal inilah yang memicu dirumuskannya kebijakan luar negeri feminis pada 2014 oleh pemerintah Swedia. Swedia merupakan negara pertama yang menganut kebijakan luar negeri feminis. Kebijakan luar negeri feminis ini diadopsi oleh Swedia untuk pertama kalinya pada tahun 2014 ketika Stefan Löfven terpilih menjadi Perdana Menteri. Swedia menjadi negara pertama di dunia yang secara terbuka mengadopsi apa yang secara eksplisit disebut "kebijakan luar negeri feminis," menempatkan promosi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di pusat agenda diplomatiknya. (Ministry for Foreign Affairs, 2014)

Kebijakan ini dibentuk oleh Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallström. Dalam merumuskan kebijakan feminis luar negeri ini Wallström menggunakan 4R sebagai acuannya, 4R ini merujuk pada: *Representation, Rights, dan Reallocation* berdasarkan *Reality*. (Ministry for Foreign Affairs, 2018). Dengan kata lain, Swedia berupaya mempromosikan perwakilan perempuan dan partisipasi dalam politik secara umum dan dalam proses perdamaian pada khususnya; mengadvokasi hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, termasuk perlindungan perempuan dari

kekerasan seksual dan gender dan bekerja menuju distribusi pendapatan global dan sumber daya yang lebih peka gender dan merata. Swedia juga telah meluncurkan apa yang disebut dengan Handbook on Feminist Foreign Policy pada 23 Agustus 2016 dimana buku pegangan ini mencakup metode dan pengalaman, dan dimaksudkan sebagai panduan dalam pekerjaan internasional untuk kesetaraan gender dan semua perempuan dan anak perempuan agar menikmati hak asasi manusia sepenuhnya. Dalam buku itu juga tercantum tujuan Swedia mengejar kebijakan luar negeri feminisnya, tujuannya adalah untuk berkontribusi pada kesetaraan gender dan penikmatan penuh hak asasi manusia oleh semua perempuan dan anak perempuan, mereka berupaya untuk mencapai enam tujuan eksternal yaitu berpartisipasi dalam peningkatan *human rights, freedom from violence, participation in peace efforts, political participation, economic empowerment and sexual and reproductive health and rights (SRHR)*. Tujuan kebijakan ini sejalan dengan *Sustainable Development Goal* dari PBB Tujuan 5 yaitu “*Achieve gender equality and empower all women and girls*”. (Ministry for Foreign Affairs, 2018)

Swedia juga merupakan negara pertama yang memiliki *feminist government*. Melalui pemerintahan feminis ini Swedia memiliki rencana aksi nasional untuk mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan dan bekerja secara aktif untuk memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan ke dalam semua operasi internasional di negara-negara konflik dan pasca konflik. Situasi representasi perempuan di institusi politik Swedia sendiri menunjukkan bahwa 44 persen dari anggota parlemen Swedia terdiri dari perempuan, yaitu dari 349 anggota yang terpilih, 152 anggota merupakan perempuan, hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan sangatlah dijunjung tinggi oleh negara ini. (Government Offices of Sweden, 2014). Oleh karena itu Swedia sebagai negara feminis merupakan merupakan negara yang sangat gencar dalam usahanya mempengaruhi negara – negara berkembang untuk menerapkan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Strategi – strategi yang digunakan dalam mentransfer nilai – nilai feminis ini pada umumnya dilakukan dengan cara yang persuasif baik itu melalui penciptaan

dialog dan pertemuan maupun memberikan bantuan luar negeri terhadap negara – negara yang menjadi sasaran kebijakan luar negeri feminis ini.

Kampanye *Midwives4all* yang diluncurkan pada tahun 2015 merupakan salah satu bentuk diplomasi digital yang dilaksanakan Swedia untuk mencapai kebijakan luar negeri feminisnya yaitu mencapai salah satu dari enam tujuan eksternal dari kebijakan feminis ini yaitu meningkatkan *sexual and reproductive health and rights (SRHR)*. Kesehatan seksual dan reproduksi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling umum bagi anak perempuan dan perempuan di negara-negara yang sedang berkembang. Angka kematian ibu masih relatif tinggi di seluruh dunia. Isu ini merupakan isu yang sangat vital di Uganda dimana melalui diplomasi ini Swedia berupaya untuk menciptakan advokasi, mempengaruhi pembuat kebijakan agar menaruh perhatian yang lebih besar terhadap suatu isu krusial yang sedang terjadi di Uganda, memobilisasi komunitas, dan menarik anak – anak muda untuk berkarir dalam bidang kebidanan. Unsur penting dari pekerjaan advokasi ini memiliki tujuan untuk merangkul lebih banyak pihak untuk menaruh perhatian yang lebih besar dan mengubah sikap diskriminatif terhadap akses perempuan dan anak perempuan terhadap SRHR. (Embassy of Sweden in Kampala, 2015)

Hanya setengah dari keseluruhan jumlah anak – anak yang dilahirkan dengan bantuan bidan yang sudah terlatih, oleh karena itu angka kematian ibu pada saat melahirkan sangat tinggi di Uganda, dimana terdapat 20 ibu yang meninggal pada saat melahirkan setiap harinya. Oleh karena itu *goal* dari kampanye ini adalah untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan, memobilisasi komunitas, dan menarik anak – anak muda yang ada di Uganda untuk mengambil profesi dalam bidang kebidanan. (Embassy of Sweden in Kampala, 2015). Isu yang dipromosikan kampanye ini sangat menarik banyak perhatian serta memiliki dampak yang besar di Uganda hingga dimasukkan dalam agenda debat publik di Uganda pada 2015. Pemerintah Swedia yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam bidang kesehatan melalui pengalamannya ingin meyakinkan Uganda bahwa proses peningkatan kualitas kesehatan dimulai dari membangun lingkungan domestik dimana isu-isu gender diperdebatkan secara teratur dan terbuka. (New Vision, 2015)

Kampanye ini merupakan alat yang digunakan oleh Swedia untuk mempromosikan isu yang ingin diviralkan di Uganda agar menjadi perhatian bagi Uganda. Kampanye ini merupakan salah satu alat utama dan terpenting dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan feminis yaitu melalui *gender mainstreaming*. *Gender mainstreaming* bukanlah tujuan melainkan suatu strategi, pendekatan dan sarana untuk mencapai tujuan dari kesetaraan gender. *Gender mainstreaming* ini memastikan bahwa perspektif gender adalah pusat dari semua kegiatan seperti pembangunan, kebijakan, penelitian, advokasi atau dialog, legislasi, alokasi sumber daya, perencanaan, implementasi dan pemantauan dalam program dan proyek. Kampanye ini dilakukan guna melipatgandakan upaya dalam mencapai the Sustainable Developments Goals 3 di Uganda dimana target dibawah ini sudah dicapai oleh negara Swedia sendiri. Rasio kematian ibu di Swedia sendiri telah lama memenuhi target yang ditetapkan dalam SDG Goal 3 ini, yakni kurang dari 70 kematian per 100.000 kelahiran. Pada 2015, hanya satu wanita yang meninggal pada saat melahirkan. (UN High Level Political Forum 2017, 2017)

Melihat banyaknya dampak positif yang dihasilkan dengan peningkatan kualitas kebidanan di negara Swedia melalui kebijakan-kebijakan berbasis kesetaraan gender dalam berbagai sektor di Swedia merupakan alasan mengapa negara ini sangat antusias dalam usahanya untuk menanamkan nilai – nilai kesetaraan gender di negara lain, dalam hal ini Uganda, pemerintah Swedia merasa hal ini perlu diterapkan di berbagai negara agar kesejahteraan dan perdamaian dunia dapat tercapai. (UNICEF, 2015). SDG Goals 3 ini sendiri berisi target sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran.
2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, dimana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran.

Seorang bidan di Uganda melayani sekitar 350-500 kelahiran bayi per tahun, jauh di atas rekomendasi WHO dimana normalnya bidan hanya bisa melayani 175 kelahiran bayi per tahun. Angka kematian ibu pada saat melahirkan (*maternal mortality rate*) pada 2015 di Uganda yaitu terdapat 387 kematian per 100.000 kelahiran. Meskipun jumlah perempuan Uganda yang meninggal saat melahirkan telah mengalami pengurangan sebanyak 24%, dari 438 (pada 2011) menjadi 368 kematian per 100.000 kelahiran pada tahun 2016, jumlahnya masih terbilang sangat tinggi dan sangat jauh dari the Sustainable Developments Goals 3 yang berusaha mencapai 70 kematian per 100.000 kelahiran. Swedia sendiri telah lama mendukung Pemerintah Uganda melalui United Nations Population Fund (UNFPA) dengan mendukung melalui pendanaan pelatihan kebidanan di Uganda. Melalui Kampanye Midwives4all ini sendiri sebuah perjanjian baru ditandatangani dengan UNFPA pada tahun 2015. (Embassy of Sweden in Kampala, 2015)

Sejak 2009, total sebanyak 510 bidan telah dilatih di bawah program Swedia, 336 di antaranya telah menyelesaikan pelatihan dan 247 di antaranya telah dikerahkan untuk melayani distrik masing-masing, terutama wilayah Karamoja. Sejak 2009, UNFPA dengan dukungan dari pemerintah Swedia telah bekerja dengan pemerintah Uganda untuk meningkatkan standar kebidanan di negara Uganda dengan memberikan dukungan kepada lebih dari 18 sekolah kebidanan. Sebanyak 510 bidan telah dilatih sejak 2010, di mana 336 (66%) telah menyelesaikan pelatihan dan memenuhi syarat. Sebanyak 247 di antaranya (74%) telah terikat dengan berbagai fasilitas kesehatan yang terletak di masyarakat yang sulit dijangkau di seluruh negeri. (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2017)

Pelaksanaan kampanye ini dilakukan mulai 23 Februari 2015 hingga 1 Januari 2016. Pada peluncuran Kampanye Midwives4all yang dibuka oleh Ibu Negara Uganda, Janet Musevini memuji pemerintah Swedia atas usahanya dalam membangkitkan kesadaran masyarakat Uganda mengenai pentingnya peran bidan dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak. Pemerintah Uganda pun kini telah memprakarsai dana beasiswa untuk kabupaten-kabupaten dengan jumlah staf bidan tertinggi di wilayah Karamoja, bekerja sama dengan para mitra. (New Vision, 2015). Sebagai pihak luar,

Swedia tentunya tidak bisa mengatur kebijakan kebidanan secara langsung di Uganda oleh karena itu strategi mereka adalah dengan cara menciptakan advokasi serta mempengaruhi para pembuat kebijakan agar memiliki kesadaran akan isu tersebut, sehingga melalui pengaruh yang ditanamkan para pembuat kebijakan tersebut dapat sadar dan peduli terhadap keadaan kebidanan dalam negerinya. The Swedish Ministry of Foreign Affairs menggunakan tag @midwives4all dan hashtag #midwives4all dalam setiap aktivitas kampanyenya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal 'midwifery'. Implementasi diplomasi digital yang sukses termasuk terciptanya diskusi yang berhubungan tren hashtag di kalangan audiensi yang ditargetkan. (Hoffman, Digital public diplomacy on Twitter? The case of @sweden., 2015). Swedia telah berhasil merangkul para pembuat kebijakan di Uganda, jurnalis, blogger, youtuber, hingga ibu negara Uganda untuk *concern* terhadap keadaan 'midwifery' di Uganda. Audiens dari Kampanye Midwives4all ini telah mencapai sekitar 4,5 juta audiens, kampanye ini pun telah disalurkan melalui radio, televisi, surat kabar, situs – situs internet dan media sosial. (Embassy of Sweden in Kampala, 2015).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Kampanye Midwives4all bekerja di Uganda sebagai bagian dari kebijakan feminis Swedia di Uganda. Peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh Midwives4all Campaign ini dalam usaha Swedia untuk mencapai kebijakan luar negeri feminis di Uganda. Penelitian ini dianggap penting bagi penulis karena melalui kampanye yang berbasis instrumen digital ini Swedia berhasil mempengaruhi negara lain, dalam hal ini Uganda, untuk mengadopsi apa yang sudah ditransfer oleh Swedia. Peneliti ingin menganalisa pelaksanaan kampanye digital yang dimanfaatkan Swedia dalam pencapaian kebijakan luar negeri feminisnya. Penulis beranggapan bahwa pencapaian kebijakan luar negeri feminis melalui kampanye diplomasi digital ini sangat menarik untuk diteliti karena penggunaan media digital dalam diplomasi sangatlah penting dan efektif pada era dunia tanpa batas ini. Kemunculan media sosial telah membuat kolaborasi lebih mudah dan memiliki dampak potensial yang lebih kuat.

Penelitian ini memberikan tantangan tersendiri bagi penulis karena penelitian ini bukanlah penelitian yang umum mengingat belum adanya penelitian yang menjelaskan

topik tersebut sebelumnya, namun disisi lain hal tersebutlah yang menjadi kekuatan dari penelitian ini. Swedia merupakan negara yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memastikan adanya kesetaraan gender dalam masyarakat dan hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi perkembangan negara ini sendiri baik di sisi ekonomi maupun politik sehingga topik ini sangat menarik untuk diteliti agar dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan luar negeri feminis melalui Kampanye Midwives4all.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh Kampanye Midwives4all terhadap upaya pemenuhan hak perempuan di Uganda ?

## **1.3. Kerangka Pemikiran**

### **1.3.1. Kebijakan Luar Negeri Feminis**

Alwan dan Weldon mendefinisikan Kebijakan Luar Negeri Swedia sebagai tindakan terhadap orang-orang di luar batas-batas nasional yang dipandu oleh komitmen terhadap kesetaraan gender dan yang berupaya untuk memecahkan masalah-masalah dominasi laki-laki, ketidaksetaraan gender dan devaluasi dan penghinaan terhadap mereka yang tidak menyesuaikan diri terhadap stereotip gender tradisional. Stereotip tradisional disini merujuk pada adanya kekerasan yang diasosiasikan dengan laki – laki yang menganggap bahwa hal tersebut sebagai alat yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan dominasi. Kebijakan luar negeri feminis berupaya untuk melawan preferensi dan stereotip nilai ini. (Alwan dan Weldon, 2017, hal.6). Alwan dan Weldon juga menguraikan tiga pendekatan utama untuk kebijakan luar negeri feminis yaitu feminisme liberal, pasifisme, dan feminisme interseksional global. Di antara pendekatan tersebut pendekatan yang digunakan Swedia dalam kebijakakan luar negerinya adalah pendekatan feminisme liberal.

#### **1.3.1.1. Feminisme Liberal**

Liberalisme memiliki komitmen terhadap kesetaraan dan kebebasan individu dan juga keadilan di lembaga-lembaga politik. Feminisme liberal menekankan

pentingnya meningkatkan pemenuhan hak-hak hukum dan perlindungan bagi perempuan secara perorangan daripada perempuan sebagai suatu kelompok. Oleh karena itu dengan mendorong partisipasi perempuan yang setara dalam pemerintahan maupun dalam militer adalah prioritas khusus para feminis liberal. Karena dengan dimasukkannya perempuan dalam politik, perempuan memiliki peran untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Menurut Alwan dan Eldon terdapat lima prinsip penerapan dari kebijakan luar negeri feminis yang liberal yaitu: adanya presentasi perempuan dalam posisi eksekutif kebijakan luar negeri, keterlibatan perempuan dalam militer, promosi hak asasi perempuan, komitmen resmi terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dan penerapan hak-hak perempuan dalam konflik dan pascakonflik. Negara dengan *liberal feminist foreign policy* memiliki komitmen terhadap peningkatan status perempuan dalam pembangunan global dan kesetaraan gender yang dapat dilihat dari ratifikasi terhadap perjanjian maupun instrumen yang mendukung kesetaraan gender dan hak – hak perempuan. (Alwan & Weldon, 2017, hal. 7)

Dalam Handbook Sweden's feminist foreign policy (2018), adanya The Universal Declaration of Human Rights, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), The declarations and actions plans from the UN World Conference on Women in Beijing and the International Conference on Population and Development in Cairo, The United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security, and subsequent resolutions, The 2030 Agenda for Sustainable Development dan The EU action plan for gender equality and women's empowerment in EU's external relations (2016–2020) merupakan kerangka kerja internasional yang membentuk dasar bagi komitmen Swedia. "*Sweden's feminist foreign policy aims at ensuring women's rights and participation in central decision-making processes*", (Government Offices of Sweden, 2014).

Dari pernyataan Wallström tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan feminis yang diadopsi Swedia pada umumnya mengarah pada integrasi perempuan pada lembaga-lembaga politik dan melihat negara dan reformasi hukum secara lebih umum sebagai proyek feminis yang penting, hal ini senada dengan komitmen dari feminis liberal yang

berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan dalam mencapai kesetaraan serta melibatkan negara dalam usahanya. Karena adanya kesetaraan gender merupakan masalah fundamental dari hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial.

Mary Wollstonecraft (1759-1799) yang merupakan pencetus gerakan feminis liberal memiliki fokus pada penghapusan subordinasi perempuan, berdasarkan sejarahnya kaum feminis liberal selalu berupaya untuk menghapus akar dari kendala adat maupun hukum yang menghalangi kesuksesan perempuan dalam dunia publik. Dalam tulisannya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman* ia berpendapat bahwa perempuan berhak untuk mendapat pendidikan yang sama seperti apa yang diperoleh laki – laki. Feminis liberal juga ingin meningkatkan peran dari perempuan dalam dunia politik internasional. Mary percaya bahwa ketika perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan ekonomi maka perempuan pun dapat berkembang secara optimal layaknya laki – laki. (Putnam, 1998, hal.21). Termasuk juga pelibatan perempuan dalam pembangunan, yang populer disebut *Women in Development*, merupakan ciri utama dari gerakan feminisme liberal ini. (Sofia-Rothschild, 2009). Mary juga menentang ide mengenai perempuan yang dianggap harus selalu bergantung pada laki – laki. Feminisme liberal percaya bahwa kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai melalui regulasi yang tidak membedakan hak laki-laki dan perempuan. Dalam Hubungan Internasional, gender merupakan variabel dalam menganalisis kebijakan luar negeri. Perspektif gender merupakan perspektif yang digunakan dalam setiap pengambilan kebijakan. Aliran feminisme liberal berakar dari filsafat liberalisme yang memiliki konsep bahwa kebebasan merupakan hak setiap individu sehingga perempuan harus diberi kebebasan untuk memilih tanpa terkekang oleh pendapat umum maupun hukum.

### **1.3.2. Diplomasi Publik**

Saat ini di tengah isu terorisme yang kian merajalela, memiliki kapabilitas militer yang kuat saja dianggap tidak cukup, melainkan memerlukan *soft power* untuk memenangkan hati dan pikiran. *Soft power* saling berhubungan dengan konsep diplomasi publik dan diplomasi digital. Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai oleh

suatu aktor dalam hubungan internasional bukan hanya pemerintah namun juga masyarakat dalam suatu negara yang dituju oleh aktor tersebut.

Paul Sharp mendefinisikan diplomasi publik merupakan *'the process by which direct relations with people in a country are pursued to advance the interests and extend the values of those being represented'*. (Sharp, 2005, hal. 106). Pemerintah menggunakan diplomasi publik untuk membantu mendorong publik agar memiliki pandangan yang mendukung kebijakan mereka dan dengan demikian lebih mudah mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka. Sedangkan menurut Nye, diplomasi publik adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya *soft power* untuk berkomunikasi dan menarik bukan hanya pemerintah namun publik dari negara lain. (Nye, 2008, hal. 95)

Berdasarkan pengertian diatas pemerintah berusaha mengejar kebijakan luar negeri feminisnya di Uganda dengan merangkul masyarakat Uganda serta pemangku kepentingan yang ada disana. Upaya pencapaian ini juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Swedia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar yang ada di Uganda, namun juga dengan melibatkan organisasi – organisasi internasional seperti UNFPA maupun organisasi non pemerintah lainnya. Budaya yang mengedepankan isu kesetaraan gender serta baiknya kondisi kesetaraan gender yang dapat dilihat dari partisipasi politik wanita di Swedia serta adanya kondisi kebidanan dengan kualitas yang baik di Swedia menjadi dasar mengapa negara ini ingin mentransfer nilai – nilai politik serta budaya yang dimilikinya ke negara sasaran yaitu Uganda. Melalui kampanye yang disebarakan melalui media digital ini Swedia ingin agar pemerintah Uganda lebih berkomitmen untuk mengatasi defisit kebidanan terutama di daerah yang sulit dijangkau di Uganda dan meningkatkan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah di Uganda.

### **1.3.3. Diplomasi Digital**

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada era globalisasi telah memberikan dimensi baru dalam praktek diplomasi publik, fenomena ini kemudian dinamakan diplomasi digital atau yang juga biasa disebut *eDiplomacy*. Diplomasi

digital berevolusi dari diplomasi publik (Hoffman, Digital public diplomacy on Twitter? The case of @sweden., 2015), suatu bentuk praktik diplomatik, yang telah didefinisikan sebagai

"Instrumen yang digunakan oleh negara untuk memahami budaya, sikap, dan perilaku; membangun dan mengelola hubungan; dan mempengaruhi pemikiran dan memobilisasi tindakan untuk menumbuhkan minat dan nilai mereka". (Nye, 2008, hal.95)

Menurut Segev dan Manor, diplomasi digital merujuk terutama pada meningkatnya penggunaan *platform* media sosial oleh suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dan secara proaktif mengelola citra dan reputasinya. (Segev & Manor, 2015, hal.6). Mereka menekankan bahwa diplomasi digital terdapat pada dua level: yaitu dari kementerian luar negeri dan kedutaan – kedutaan yang tersebar di seluruh dunia. Dengan beroperasi pada dua level ini, negara-negara dapat menyesuaikan pesan-pesan kebijakan luar negeri dan nasional dengan karakteristik unik dari audiens lokal terkait dengan sejarah, budaya, nilai-nilai dan tradisi, dengan demikian dapat memfasilitasi penerimaan kebijakan luar negeri mereka dan citra yang hendak mereka capai. Diplomasi digital dapat membantu memastikan bahwa citra yang dipromosikan sebuah negara sesuai dengan kenyataan yang dilakukan negara tersebut karena konten – konten yang dibagikan di akun media sosial didasarkan pada tindakan nyata yang diambil oleh suatu bangsa di arena global maupun sasaran kebijakan luar negerinya. Selain itu, media sosial memungkinkan interaksi dua arah dan keterlibatan antara kementerian luar negeri dan pengikut mereka sehingga memfasilitasi terciptanya hubungan jangka panjang dan loyalitas. Menurut Lewis (2014), diplomasi digital adalah penggunaan alat komunikasi digital (media sosial) oleh para diplomat untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan masyarakat umum. Sedangkan bagi Potter (2002), diplomasi digital terutama mengacu pada praktik diplomatik melalui teknologi digital dan jaringan, termasuk internet, perangkat seluler, dan saluran media sosial. Dan Hanson mendefinisikan diplomasi digital sebagai penggunaan internet dan teknologi komunikasi informasi baru untuk membantu melaksanakan tujuan diplomatik. (Hanson, 2012, hal.2 ). Sedangkan Dian Effendi secara umum mendefinisikan diplomasi digital sebagai sebuah praktik diplomasi yang dilaksanakan, baik oleh aktor negara maupun

negara, dalam upaya menjalin hubungan luar negeri dengan menggunakan media teknologi informasi. (Effendi, 2008)

Definisi – definisi diatas pada umumnya memiliki inti yang hampir sama yaitu adanya keterlibatan teknologi digital dalam mencapai tujuan diplomatik suatu negara. Penelitian ini mengadopsi pengertian diplomasi digital oleh Segev dan Manor (2015) yang menyatakan diplomasi digital merujuk terutama pada meningkatnya penggunaan platform media sosial oleh suatu negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dan secara proaktif mengelola citra dan reputasinya. Karena dalam usahanya, negara yang ingin diteliti oleh peneliti, diplomasi digital dioperasikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar dari negara yang hendak diteliti serta merangkul organisasi internasional terkait. Keuntungan dari penggunaan media digital adalah adanya umpan balik instan atas apa yang disampaikan dalam platform tersebut. Kampanye dengan menggunakan tagar atau *hashtag* *Midwives4all* pun berusaha membangun dialog tentang masalah yang menjadi fokus kampanye ini. Kampanye ini juga merupakan salah satu cara para diplomat Swedia dalam mempresentasikan pemikiran dan kebijakan Swedia juga komitmen Swedia dalam usahanya untuk mentransfer nilai – nilai feminis yang dianut negara itu terhadap negara yang menjadi tujuan kampanye ini, dalam kasus ini terhadap Uganda. Penggunaan media digital dalam kampanye ini merupakan strategi diplomasi digital yang dilakukan oleh Swedia atau yang sering disebut dengan "kampanye *hashtag*", cara ini dilakukan untuk berkontribusi dalam debat internasional tentang masalah-masalah yang dianggap penting oleh Swedia. Kampanye *hashtag* diyakini dapat memberikan peluang bagus untuk mempromosikan masalah yang sejalan dengan agenda kebijakan luar negeri feminis Swedia.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kampanye *Midwives4all* bekerja sebagai bagian dari kebijakan luar negeri feminis Swedia di Uganda. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka akan dilakukan melalui

pengambilan data dari sumber – sumber seperti buku, dokumen, jurnal, majalah, surat kabar, laporan maupun situs- situs yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *process-tracing* dimana peneliti tidak sekedar mencari hubungan sebab-akibat melainkan berfokus pada proses dan mekanisme terjadinya sesuatu. Kemudian jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif-Analitik, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan secara deskriptif.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Pada bab I, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah yang ingin dijawab, landasan konseptual yang akan digunakan yang akan digunakan dalam penulisan dan metode penulisan. Bab II akan difokuskan untuk menjelaskan mengenai Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia, *Midwives4all Campaign*, serta dinamika diplomasi publik dan digital yang dilakukan oleh Swedia dalam usahanya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan inisiatif-inisiatif atau langkah – langkah apa saja yang sudah diambil Swedia guna mencapai kebijakan luar negeri feminis dan meningkatkan diplomasi digital dalam pemerintahannya. Bab III akan memberikan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis pada bab I dengan menjelaskan bagaimana *Midwives4all Campaign* bekerja dalam Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia di Uganda disertai analisis feminisme liberal. Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran – saran penelitian lebih lanjut.